

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV APBD-P 2024



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya sehingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dengan baik.

Laporan Evaluasi Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang Kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada triwulan IV Tahun 2024 dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi perencanaan Program dan Anggaran untuk triwulan berikutnya.

Kami sadar bahwa laporan akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS,



ANDI WIJA HASAN, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 197403232003121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum Organisasi.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
1. Visi	6
2. Misi	6
3. Tujuan	6
4. Sasaran	6
5. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	8
6. Program	10
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja DPKPP Kab. Luwu Timur Triwulan III	12
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	13
3.3 Realisasi Anggaran	65
BAB IV PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi SDM DPKPP Berdasarkan jenis kelamin Tahun 2024	4
Tabel 2	Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024	4
Tabel 3	Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2024	5
Tabel 4	Sasaran dan Indikator Kinerja DPKPP Kab. Luwu Timur	7
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama DPKPP Kab. Luwu Timur	9
Tabel 6	Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024 DPKPP Kab. Luwu Timur	10
Tabel 7	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan IV DPKPP Kab. Luwu Timur	12
Tabel 8	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I	13
Tabel 9	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya	16
Tabel 10	Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Pengembangan Perumahan	24
Tabel 11	Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Kawasan Permukiman Tahun 2024	31
Tabel 12	Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	36
Tabel 13	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II Triwulan	37
Tabel 14	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya DPKPP Kab. Luwu Timur	38
Tabel 15	Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Subkegiatan Sasaran II Tahun 2024	46
Tabel 16	Capaian Sasaran III	49
Tabel 17	Target dan Realisasi Triwulan III	52
Tabel 18	Capaian Program Pendukung Sasaran III	58
Tabel 19	Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2024	65

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun laporan setiap pertriwulan yang akan menjadi media pertanggungjawaban organisasi. Laporan ini merupakan bahan evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam setiap pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Laporan kinerja triwulan IV Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu Timur adalah perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada DPKPP Kabupaten Luwu Timur atas penggunaan anggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja triwulan IV DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah sebagai penjabaran visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

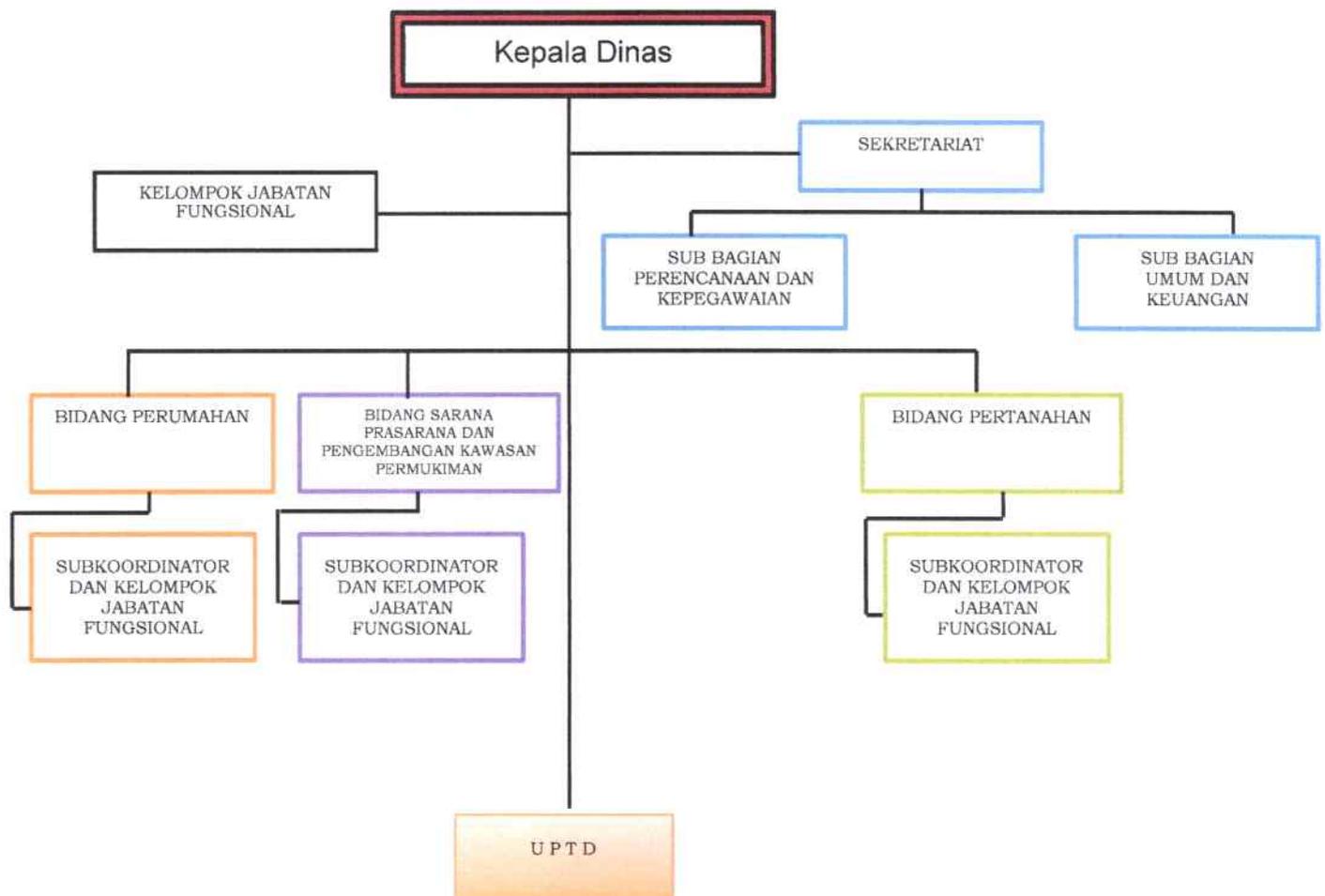
Tujuan Penyusunan laporan kinerja triwulan IV DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi DPKPP Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, seperti termuat pada bagan di bawah ini sebagai berikut

STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok DPKPP Kabupaten Luwu Timur Sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi secara singkat, fungsi pokok dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan;
- Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- Merumuskan kebijakan teknis di pertanahan;
- Merumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- Melaksanakan administrasi Dinas; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di DPKPP Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di DPKPP Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2024 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi SDM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	17	4	21

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia pada akhir tahun 2024 sebanyak 21 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 17 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 4 orang.

Tabel 2
Komposisi SDM
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	1	16	-	-	1	3	21

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada triwulan III tahun 2024, berdasarkan jenjang pendidikan, S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 16 orang, D1 1 orang, SMA sebanyak 3 orang.

TABEL 3
Komposisi SDM
Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2024

No	Jenjang Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	II a	1	-	1
2	III a	1	-	1
3	III b	3	-	3
4	IV a	-	2	2
Total		5	2	7

Dari tabel 1.3 komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenjang eselon sebanyak 7 orang, terdiri dari eselon II/a sebanyak 1 orang, eselon III/a sebanyak 1 orang eselon III/b sebanyak 3 orang dan eselon IV/a sebanyak 2 orang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Sesuai dengan Visi Luwu Timur yaitu **"LUWU TIMUR yang Berkelanjutan dan Lebih maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"**.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka di perlukan misi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 melaksanakan misi ke-3 (M3), Ke-4 (M4) yaitu :

1. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang Berkualitas (M3);
2. Menciptakan Kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4).

3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan;
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

1. Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak;
2. Tersedianya tanah untuk kepentingan umum;
3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

Tabel 4
Sasaran dan Indikator Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2024
TUJUAN 1 : Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	<i>Persentase Pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (%)</i>	42,99
	<i>Cakupan pengelolaan penggunaan dan Pemanfaatan tanah (%)</i>	100
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	<i>Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah (%)</i>	6,23
	<i>Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani (%)</i>	47,37
SASARAN 2 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	<i>Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah(%)</i>	100
TUJUAN 2: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Predikat Sakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	BB
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	<i>Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</i>	77,80

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total huni	%	(Jumlah seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) – Jumlah RTLH yang ditangani) / Jumlah seluruh Rumah) x 100%	Laporan Bidang Perumahan	Bidang Perumahan
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	%	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani/luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha)x 100%	Laporan Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman	Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman
2	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	%	(Luasan tanah yang dimanfaatkan/Luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x100%	Laporan Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan

6. Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 6
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024
DPKPP Kabupaten Luwu Timur

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Perumahan 2. Kawasan Permukiman 3. Peningkatan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)
SASARAN 2: Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 2. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 3. Pengelolaan Tanah Kosong 4. Pengelolaan Izin Membuka Tanah 5. Penatagunaan Tanah
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2024, berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Pada Triwulan IV Tahun 2024. Sasaran, indikator, target kinerja Program disajikan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Atas Perjanjian Kinerja (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target triwulan IV. Dalam bab ini juga akan disajikan realisasi keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan IV Tahun 2024.

3.1 Capaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan III

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja triwulan IV Tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2024 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan IV Tahun 2024

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	6,23	5,61	90,05
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	47,37	45,37	95,78
2.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	100	100	100
3.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahn	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	77,80	0	0

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Sasaran Strategis I

Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak

Tabel 8
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I

NO.	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	6,23	5,61	90,05
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	47,37	45,37	95,78

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran I memiliki 2 indikator yaitu : Persentase penurunan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terhadap total rumah dan Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani.

➤ **Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah

sebagai berikut : $\frac{((\text{Jumlah seluruh rumah tidak layak huni (RTLH)} - \text{Jumlah RTLH yang ditangani})/\text{Jumlah seluruh rumah}) \times 100\%$. Indikator sasaran ini, dengan target 6,23, realisasi sampai dengan triwulan IV sehingga capaian masih 90,05%. Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni yang disinkronkan dengan beberapa kegiatan dan program, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang beririsan dengan DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yaitu Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial dan P3A. Salah satu strategi dalam penurunan jumlah rumah tidak layak huni adalah peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan dan pemutakhiran data RTLH pada aplikasi e-RTLH, sehingga penanganan RTLH dapat tercapai dengan tepat sasaran dan maksimal. Mengacu kepada IKU Kepala Daerah, terkait pengukuran indeks daya saing infrastruktur daerah, maka DPKPP Kabupaten Luwu Timur beserta stakeholder lainnya mempunyai tugas untuk mencapai indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah, salah satunya peningkatan rumah tidak layak huni.



Grafik. 1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Triwulan IV

➤ **Persentase kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang Tertangani**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “ Luas kawasan di bawah 10 ha yang ditangani dibagi luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha dikali seratus persen”. Indikator sasaran ini, dengan target 47,37 %, realisasi 45,37 %, masing-masing program yang mendukung tercapainya sasaran ini. Realisasi yang diperoleh merupakan hasil

pelaksanaan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu instrument untuk mengukur IKU Kepala Daerah terkait pengukuran Indeks Daya Saing Infrstruktur Daerah.



Grafik. 2

Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Triwulan IV

Rencana aksi untuk mendukung sasaran I adalah peningkatan kapasitas ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penyediaan hunian, peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman.

❖ Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran I yaitu :

✚ Program Pengembangan Perumahan :

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

✚ Program Kawasan Permukiman

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Permukiman

2. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

✚ Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 9

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran I	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak						Target Tahun 2024 (%)
	Triwulan III Tahun 2024			Triwulan IV Tahun 2024			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	0	0	0	6,23	5,61	90,05	6,23
Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	0	0	0	47,37	45,37	95,78	47,37

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan untuk capaian triwulan IV, telah terealisasi, variable-variabel pada formulasi telah terpenuhi nilainya, sehingga capaian dapat diperoleh.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DPKPP

Sampai pada triwulan IV telah realisasi, berdasarkan capaian proses rencana aksi sampai dengan triwulan IV Tahun 2024, jika dibandingkan dengan tahun 2026, sangat memungkinkan dapat dicapai. Upaya yang dilakukan untuk indikator “Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah” adalah kolaborasi dengan beberapa stake holder antara lain PUPR terkait layanan keciptakarya air minum, sanitasi, drainase, penerangan jalan, Dinas Lingkungan Hidup program persampahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Bantuan Keuangan Khusus dengan program bedah rumah, Dinas Kesehatan pada program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan kesehatan bersumber daya masyarakat kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada program penanggulangan bencana. Dan langkah-langkah strategis yang telah disusun untuk indikator “Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani” adalah telah disusun dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah disahkan melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 59 Tahun 2023, telah disusun master plan dan detail Engineering Design untuk permukiman kawasan kumuh dan adanya inovasi “Tamanku Asri” yaitu Penataan Permukiman Kumuh Aman, Sehat, Ramah.

Penentuan target pada sasaran I pada masing-masing indikator jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah :

- ✚ Indikator Persentase Penurunan Jumlah Rumah tidak Layak Huni terhadap Total Rumah, target ditetapkan mengacu pada realisasi yang diperoleh pada tahun 2023, hal ini dikarenakan target pada Rencana Strategis 2021-2026 telah tercapai.
- ✚ Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani, target yang ditetapkan tidak mengacu pada target Rencana Strategis 2021-2026, dikarenakan target pada tahun 2023 belum tercapai, sedangkan untuk target

pada Renstra lebih tinggi untuk tahun 2024, sehingga untuk memperoleh realisasi yang efektif, target pada tahun sebelumnya ditetapkan sebagai target.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Rumah Layak Huni)

Pada triwulan IV belum ada perbandingan yang dapat dihitung dengan target Nasional, hal ini dari pencarian yang kami lakukan belum ada data rilis. Pada tahun sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mencatat capaian program sejuta Rumah Tahun 2023 mencapai mencapai 1.217.794 unit . Capaian yang berasal dari kontribusi Kementerian PUPR seperti Direktorat Jenderal Perumahan (DJP) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI), Kementerian/Lembaga (K/L) Lain, Pemerintah Daerah, Pengembang rumah bersubsidi dan rumah komersial dan masyarakat tersebut meliputi 1.010.142 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 207.652 unit non MBR.

Daerah Tempat Tinggal	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Menurut Klasifikasi Desa (Persen)		
	2021	2022	2023
Perkotaan	64,65	63,45	65,47
Perdesaan	55,95	56,84	59,91
Perkotaan + Perdesaan	60,90	60,66	63,15

Keterangan Data :

Sumber: BPS-RI, Susenas 2016-2023

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan IV tahun 2024 terdapat kendala terkait pencapaian sasaran dan indikator utama pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Berikut Hambatan/kendala dan solusi yang dilakukan :

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Sasaran I, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- ✦ Belum diprioritaskannya anggaran untuk penanganan kawasan kumuh;
- ✦ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari perangkat daerah;
- ✦ Belum meratanya pemahaman terkait penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan kumuh di beberapa stakeholder;
- ✦ Telah banyak upaya penanganan rumah tidak layak huni yang telah dilakukan, namun belum terpetakan dengan baik.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- ✦ Mengusulkan penggunaan dana desa selain untuk penanganan rumah tidak layak huni juga untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kawasan kumuh;
- ✦ Melakukan pemutakhiran data dan informasi rumah tidak layak huni;
- ✦ Melakukan sosialisasi terkait rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- ✦ Melakukan pemetaan terkait upaya pencegahan dan penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di bawah 10 Ha;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada triwulan IV tahun 2024 terdapat efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Berikut efisiensi yang dilakukan :

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis DPKPP Kab. Luwu Timur, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- ✦ Terkait perbaikan rumah tidak layak huni, dilakukan pengusulan melalui APBN, Bantuan Keuangan Khusus yang dilaksanakan di Desa-Desa. Selain itu melalui kelompok Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Permukiman, diusulkan untuk bantuan prasarana sarana utilitas perumahan skala besar.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- ✦ Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang SPM, maka dapat difasilitasi dengan adanya website resmi DPKPP Kabupaten Luwu Timur

sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait kebencanaan dari media dan penyebarluasan informasi kebencanaan juga dilakukan melalui Media Sosial melalui FB, IG.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya pencapaian sasaran ini, didukung oleh beberapa program dan kegiatan yaitu :

+ Program Pengembangan Perumahan

Pengembangan perumahan merupakan proses perencanaan, pembangunan dan pengelolaan area hunian yang bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat. Sasaran Program ini adalah meningkatnya capaian pengembangan perumahan. Tujuan yang akan dicapai peningkatan akses terhadap tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Indikator program Pengembangan Perumahan Tahun 2024 terdiri dari 2 indikator yaitu :

- a. Persentase rumah yang dibangun pengembang (%), dengan formulasi jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang pada tahun n /jumlah rumah yang direncanakan oleh pengembang pada tahun $n \times 100\%$. Target triwulan IV telah tercapai.
- b. Persentase rumah warga Negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni, dengan formulasi jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten yang direhabilitasi dan dibangun/jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten yang seharusnya direhabilitasi dan dibangun $X 100\%$. Target triwulan IV adalah 25% dan realisasi 25%, sehingga capaian 100%. Capaian tersebut berasal dari rencana aksi pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten.

Pada tahun 2024, Program Pengembangan Perumahan didukung oleh 3 kegiatan utama yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal yaitu:

- i. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota adalah pelayanan informasi tentang penanganan bencana alam pra dan pasca bencana, yang merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak bencana

- mendapatkan tempat tinggal yang layak. Indikator kegiatan adalah jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang akan dibangun dan direhabilitasi serta jumlah dokumen hasil pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang dimanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi adalah 25% terealisasi 25%, sehingga capaian 100% . Sedangkan untuk rencana kerja ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
- a. Subkegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus adalah pengumpulan data dari 11 Kecamatan dengan mendata identitas pemilik, penyewa, alamat dan lokasi, luas bangunan dan fasilitas yang tersedia, kriteria penerimaan penghuni, indikator jumlah laporan hasil pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang dimanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan, persentase capaian kinerja ditargetkan pada triwulan IV, sedangkan untuk capaian rencana aksi 100%.
 - b. Subkegiatan Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, aktifitas pada subkegiatan ini adalah mengumpulkan data dengan mengambil data dasar dari dokumen bencana yang telah diterbitkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan, Indikator Jumlah laporan hasil pendataan perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten. Persentase capaian kinerja ditargetkan pada triwulan IV, sedangkan untuk capaian rencana aksi 100%, untuk triwulan IV.
- ii. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang terdampak bencana atau yang perlu dipindahkan dari daerah rawan. Aktifitas kegiatan ini adalah untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan dan pemulihan kondisi hidup masyarakat yang terkena dampak bencana. Untuk kegiatan ini tidak ada SK penetapan status bencana, sehingga untuk indikator dinolkan. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan,

- a. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, indikatornya adalah jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi
- b. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana, indikatornya adalah jumlah rumah korban bencana yang dibangun
- c. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota, indikatornya jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban relokasi program Kabupaten/Kota yang dibangun

Untuk kegiatan dan subkegiatan pada point ii, terlaksana jika ada bencana yang terjadi, yang disahkan melalui Surat Keputusan Bupati.

- iii. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa rumah susun dan rumah khusus dikelola dengan baik, layak huni dan berkelanjutan. Indikator kegiatan ini adalah Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola (persen), dengan formulasi “jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang ditangani dibagi seluruh jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus seluruhnya dikali seratus persen”. Capaian untuk kegiatan ini 100%, untuk realisasi kinerja 25% dari 25% yang ditargetkan dengan capaian 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, aktifitas pada subkegiatan ini adalah peningkatan kemampuan pengelola dan penghuni dalam menjaga, merawat dan mengelola lingkungan rumah susun dan/atau rumah umum, melalui pembentukan struktur organisasi pengelola, penguatan kapasitas pengelola dan penghuni, perencanaan dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas lingkungan hunian, pemberdayaan masyarakat, penyusunan aturan dan kebijakan, monitoring dan evaluasi, tindak lanjut dan peningkatan serta pelaporan dan transparansi indikator jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola. Capaian pada subkegiatan ini telah teralisasi pada triwulan IV, sedangkan untuk rencana aksi, capaiannya 100%, karena masih pada tahap identifikasi kepemilikan penghuni pada Rusunawa.

- IV. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan adalah

proses administratif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan perumahan agar sesuai dengan rencana tata ruang, standar teknis, dan peraturan yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan dilakukan secara legal, aman, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan. Indikator kegiatan adalah Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Aktifitas kegiatan ini adalah penyusunan dokumen terkait pertimbangan teknis terkait rencana tata ruang dan standar teknis sesuai kewenangan urusan perumahan. Capaian kinerja dari kegiatan ini pada triwulan IV telah terealisasi, sedangkan untuk capaian rencana aksi 100% Pencapaian target kegiatan ini didukung dengan subkegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan aktifitas pada subkegiatan ini adalah koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan seperti PUPR, DLH, PTSP dan kantor Pertanahan, dengan memberikan masukan atau pertimbangan teknis terkait rencana tata ruang dan standar teknis sesuai kewenangan urusan perumahan. Indikator subkegiatan ini adalah Jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Capaian 100% untuk target kinerja karena ditargetkan masing-masing 1 dokumen setiap triwulan dan 100% untuk rencana aksi. Berikut tabel capaian program Pengembangan Perumahan

Tabel 10

Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Pengembangan Perumahan

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN (%)				REALISASI TRIWULAN(%)				CAPAIAN TRIWULAN				KET.
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang	100%	100%	25	25	25	25	10	15	25	25	40%	60%	60%	100%	
		Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	25	25	25	25	10	15	25	25	40%	60%	60%	100%	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang akan dibangun dan direhabilitasi serta jumlah dokumen hasil pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang termanfaatkan sebagai bahan	2 Dokumen	2 Dokumen	25	25	25	25	10	15	25	25	40%	60%	60%	100%	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN (%)				REALISASI TRIWULAN(%)				CAPAIAN TRIWULAN				KET.
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		informasi perumahan															
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang dimanfaatkan sebagai bahan informasi perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	25	25	25	25	10 %	15 %	25 %	25%	40%	60%	60%	100%	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program	Jumlah laporan hasil pendataan perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	25	25	25	25	10 %	15 %	25 %	25%	40%	60%	60%	100%	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN (%)				REALISASI TRIWULAN(%)				CAPAIAN TRIWULAN				KET.
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kabupaten/Kota																
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang direhabilitasi dan dibangun	0%	0	25	25	25	0%	0%	15%	25%	0%	0%	60%	60%	0%	Untuk kegiatan dan subkegiatan ini karena tidak ada SK Status Bencana
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi	0	0	25	25	25	0%	10%	15%	25%	0%	40%	60%	60%	0%	
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun	0	0	25	25	25	0%	10%	15%	25%	0%	40%	60%	60%	0%	
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban relokasi program Kabupaten/Kota yang dibangun	0	0	25	25	25	0%	10%	15%	25%	0%	40%	60%	60%	0%	
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase rumah susun/rumah khusus yang dikelola	100%	0	25	25	25	25	10%	15%	25%	25%	40%	60%	60%	100%	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum/dan atau	2	2	25	25	25	25	10%	15%	25%	25%	40%	60%	60%	100%	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN (%)				REALISASI TRIWULAN(%)				CAPAIAN TRIWULAN				KET.
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Umum dan/atau Rumah Khusus	rumah khusus															
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi perizinan perumahan yang diterbitkan	3 Rekomendasi	3	25	25	25	25	10 %	15 %	25 %	25%	40%	60%	60%	100%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	4 laporan	4	25	25	25	25	25	25 %	25 %	25%	100%	100%	100%	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU	70,87%	71%	25	25	25	25	10 %	15 %	25 %	25%	40%	60%	60%	100%	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah seluruh lingkungan perumahan yang didukung PSU	12 perumahan	12	25	25	25	25	10 %	15 %	25 %	25%	40%	60%	60%	100%	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU	1 lokasi	1	25	25	25	25	10 %	15 %	25 %	25%	40%	60%	60%	100%	

✦ Program Kawasan Permukiman

Program kawasan permukiman merupakan aksi dan inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperbaiki infrastruktur dan mengembangkan lingkungan yang berkelanjutan. Sasaran program ini adalah meningkatnya rumah layak huni dan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani. Indikator program tahun 2024 ada 2 yaitu :

- a. Rasio rumah layak huni, dengan formulasi jumlah rumah layak huni dibagi jumlah penduduk. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, yaitu penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk teknis Bantuan Stimulan Bedah Rumah, yang pada triwulan IV terlaksana 25%, sehingga capaian 100%.
- b. Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani, dengan formulasi luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani dibagi luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha. Target triwulan IV adalah 25% dan realisasi hanya 25%, sehingga capaian 100%. Capaian tersebut berasal dari rencana aksi penginputan paket kegiatan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP), penyusunan perencanaan kawasan permukiman kumuh dan proses pelaksanaan.

Pada tahun 2024, Program Kawasan Permukiman didukung oleh 3 kegiatan utama yaitu:

- Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman adalah proses yang diatur oleh peraturan pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang, standar teknis dan persyaratan lingkungan yang berlaku. Indikator kegiatan adalah Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Aktifitas pada kegiatan ini adalah penyusunan dokumen dari hasil koordinasi dengan Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD), dengan menghasilkan pertimbangan teknis kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang , subtansi standar teknis pemenuhan upaya pengelolaan lingkungan dan pertimbangan teknis lainnya yang dibutuhkan pada proses pembangunan

dan pengembangan kawasan permukiman. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi 25% terealisasi 25%. Pencapaian rencana kerja telah terealisasi karena ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan permukiman, aktifitas subkegiatan ini adalah kegiatan koordinasi teknis rencana pembangunan, review Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi, terealisasi 25% dengan capaian rencana aksi 100% dan rencana kerja 100% dari 1 dokumen.
- Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mengatasi masalah permukiman yang tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas kegiatan ini adalah penyusunan dokumen yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penyelesaian masalah perumahan dan permukiman kumuh. Indikator, Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Indikator kegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi, terealisasi 25% dengan capaian rencana aksi 100% dan rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - a. Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP adalah review Renacana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan penyusunan dokumen Rencana Tata Letak Bangunan (RTLb), dengan indikator jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi. terealisasi 25% dengan capaian rencana aksi 100% dan rencana kerja telah terealisasi pada triwulan IV
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha merupakan salah satu kegiatan dalam

upaya mengatasi masalah perumahan yang tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas kegiatan ini berfokus pada perbaikan infrastruktur, sanitasi, kesehatan dan lingkungan, yang merupakan perwujudan untuk pencegahan kawasan kumuh dan perolehan rumah layak huni. Indikator pada kegiatan ini ada 2 yaitu :

- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dengan formulasi "jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu". Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 25% dengan capaian 100%. Target rencana kerja telah pada triwulan IV.
- Luas penanganan infrastruktur kawasan kumuh (Ha), aktifitas untuk memperoleh indikator ini adalah penanganan dan pencegahan kawasan kumuh dengan kegiatan pembangunan dan peningkatan. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 25% dengan capaian 100%. Target rencana kerja telah terealisasi pada triwulan IV.

Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, aktifitas pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi rumah tidak layak huni dan melakukan penanganan dengan berkoordinasi dengan aparat Desa sebagai pelaksana bedah rumah yang dilaksanakan di Desa dengan menggunakan BKK dan fasilitator sebagai pelaksana BSPS dengan anggaran yang bersumber dari APBN. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 25% dengan capaian 100%.
- b. Subkegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, aktifitas pada kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan fisik dan pemeliharaan untuk prasarana yang termasuk dalam kawasan kumuh dan yang merupakan aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang dimulai dari penyusunan perencanaan **Detail Engineering Design**, pembangunan dan pengawasan. Indikator, luas permukiman yang dipugar. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% terealisasi 25% dengan capaian 100%. Berikut tabel capaian program Kawasan Permukiman,

Tabel 11
Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Kawasan Permukiman

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI KINERJA	TARGET TRIWULAN (%)				REALISASI TRIWULAN (%)				CAPAIAN TRIWULAN				KET
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	47,37	45,37	25	25	25	25	10	15	25	25	40%	40%	100%	100%	
	Rasio rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	18,64%	19,31	25	25	25	25	10	15	25	25	40%	40%	100%	100%	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi	4 kegiatan	4	25	25	25	25	10	15	25	25	40%	40%	100%	100%	Program PKP merupakan program kolaborasi antar perangkat daerah dan swasta untuk pemenuhan sarana prasarana kawasan permukiman
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman	4 kegiatan	4	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	Pisew sinkronisasi usulan kelompok kerja di kecamatan dengan

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI KINERJA	TARGET TRIWULAN (%)				REALISASI TRIWULAN (%)				CAPAIAN TRIWULAN				KET
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	usulan program di Kabupaten + monirtoring program agar berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi	1 kegiatan	1	25	25	25	25	10	15	25	25	40%	40%	100%	100%	
	Penyusunan/Revie/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi	1 dokumen	0	25	25	25	25	10	15	25	25	40%	40%	100%	100%	Tahap identifikasi dan pengumpulan data untuk pemenuhan hasil review dokumen RP3KP oleh Balai Pelaksana Prasarana wilayah permukiman

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI KINERJA	TARGET TRIWULAN (%)				REALISASI TRIWULAN (%)				CAPAIAN TRIWULAN				KET
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	27,58%	30	25	25	25	25	10	15	25	25%	40%	40%	100%	100%	
		Luas penanganan infrstruktur kawasan kumuh	45	43	25	25	25	25	10	15	25	25%	40%	40%	100%	100%	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1587unit	1.587	25	25	25	25	10	15	25	25%	40%	40%	100%	100%	BKK 125 desa dengan jumlah desa yang menganggarkan bedah ada 120, dan 5 desa antara lain Pepuro Barat, Balirejo, Wanasari, Nikel dan Soroako, sudah tidak menganggarkan karena sdh tidak ada rumah tidak layak huni

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI KINERJA	TARGET TRIWULAN (%)				REALISASI TRIWULAN (%)				CAPAIAN TRIWULAN				KET
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Jumlah kawasan permukiman kumuh yang dipugar	11	11	25	25	25	25	10	15	25	25%	40%	40%	100%	100%	
2.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU	70,87%	70,97	25	25	25	25	10	15	25	25%	40%	40%	100%	100%	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah seluruh lingkungan perumahan yang didukung PSU	12 perumahan	12	25	25	25	25	10	15	25	25	40%	40%	100%	100%	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU	1 lokasi	1	25	25	25	25	10	15	25	25	40%	40%	100%	100%	

✦ **Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum**

Program ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap prasarana, sarana dan utilitas dasar yang memadai. Sasaran program ini adalah terlaksananya peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum PSU. Indikator, Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan formulasi jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu dikali 100. Target triwulan IV adalah 25% dan realisasi 25%, sehingga capaian 100%. Pada tahun 2024, Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

i. **Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** adalah bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kehidupan di lingkungan perumahan. Indikator pada kegiatan ini adalah jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% terealisasi 25% dengan capaian 100%. Target rencana kerja telah pada triwulan IV. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

a. Subkegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan fisik dan pemeliharaan untuk prasarana, sarana dan utilitas yang termasuk dalam kawasan kumuh dan yang merupakan aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang dimulai dari penyusunan perencanaan **Detail Engineering Design**, pembangunan dan pengawasan. Indikator Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU.

Tabel 12

Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN				CAPAIAN TRIWULAN				KET.
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU	70,87%	71%	25	25	25	25	10	15	25	25	40	60	60	100	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah seluruh lingkungan perumahan yang didukung PSU	12 perumahan	12	25	25	25	25	10	15	25	25	40	60	60	100	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU	1 lokasi	1	25	25	25	25	10	15	25	25	40	60	60	100	

Sasaran Strategis II
 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum

Tabel 13

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	100	100	100

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran II memiliki indikator persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah, dengan formulasi “ luasan tanah yang dimanfaatkan/luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x 100%. Target indikator sasaran IV adalah 100%, telah realisasi. Rencana aksi untuk mendukung sasaran II adalah perencanaan pengadaan tanah, identifikasi dan verifikasi tanah aset pemda yang akan dilakukan pengamanan dan sertifikasi, penetapan izin lokasi dan penyelesaian kasus tanah.



Grafik. 3

Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Triwulan IV

Rencana aksi untuk mendukung sasaran II adalah Identifikasi, inventarisasi pemetaan kebutuhan dan potensi penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran II yaitu :

- ✚ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - ✚ Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
 1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
 - ✚ Program Pengelolaan Tanah Kosong
 1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
 - ✚ Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
 1. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah
 - ✚ Program Penatagunaan Tanah
 1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Tabel 14

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran II	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum						Target Tahun 2024 (%)
	Triwulan II			Triwulan III			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	0	0	0	100	100	100	100%

Berdasarkan tabel di atas, belum dapat dijelaskan untuk capaian triwulan IV, telah terealisasi sesuai yang ditargetkan dengan membandingkan luas tanah yang

dimanfaatkan dengan luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Target Jangka Menengah

Sampai pada triwulan IV belum ada realisasi, tetapi berdasarkan capaian proses rencana aksi sampai dengan triwulan IV Tahun 2024, jika dibandingkan dengan tahun 2026, sangat memungkinkan dapat dicapai. Upaya yang dilakukan untuk indikator ini adalah digitalisasi layanan pertanahan, peningkatan pelayanan dengan sosialisasi layanan dan proses pertanahan untuk aset Pemda.

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan IV	Rata-rata realisasi sampai dengan Tahun 2024	Target Akhir Renstra
1	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	100	100	95,00

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan IV tahun 2024 terdapat kendala terkait pencapaian sasaran dan indikator utama pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Berikut Hambatan/kendala dan solusi yang dilakukan :

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- ✚ Kurangnya sosialisasi terkait pelayanan tanah;
- ✚ Minimnya kualitas SDM pertanahan;
- ✚ Kurang optimalnya dokumentasi administrasi tanah.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- ✚ Melakukan sosialisasi melalui media social dan melalui papan informasi publik;
- ✚ Memaksimalkan koordinasi lintas perangkat daerah, maupun instansi

vertical Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, terkait pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian pelayanan pertanahan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada triwulan IV tahun 2024 terdapat efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Berikut efisiensi yang dilakukan :

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis 2, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu:

- ✚ Penggunaan dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa untuk pelaksanaan persertifikatan aset Desa;
- ✚ Efisiensi anggaran untuk persertifikatan tanah warga dan tanah rumah ibadah, yang dimasukkan ke program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dengan pembebasan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang merupakan syarat untuk persertifikatan gratis. Yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

❖ Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran 2, dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yaitu:

- ✚ Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi pelayanan pertanahan;
- ✚ Komunikasi yang aktif dengan SDM yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, untuk percepatan pelayanan urusan pertanahan

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran II

✦ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini merujuk pada proses penyelesaian konflik atau perselisihan yang terjadi terkait kepemilikan atau penggunaan lahan garapan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Indikator, persentase penyelesaian kasus tanah Negara dengan formulasi jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus yang terdaftar kali 100%. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%.

Pada tahun 2024, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan didukung 1 kegiatan :

- i. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan fasilitasi penyelesaian kasus. Indikator jumlah kasus terdaftar. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja 100% dengan 1 laporan dan 1 untuk realisasi, sehingga capaian 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - a. Subkegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dan rapat-rapat bersama stakeholder yang terkait dalam memfasilitasi penyelesaian kasus tanah yang bersinggungan dengan aset Pemda yang dilaporkan. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja 100% dengan 1 laporan dan 1 untuk realisasi, sehingga capaian 100%, yaitu fasilitasi penyerahan lokasi old Camp dari PT. Vale Indonesia, Tbk, Desa Soroako, Kecamatan Nuha. Berikut tabel capaian program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

✦ Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini dirancang oleh Pemerintah untuk memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah dan pihak-pihak yang terkena dampak dari proyek pembangunan infrastruktur. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah pendataan, inventarisasi, konsultasi publik, negosiasi dan kesepakatan, pembayaran ganti kerugian, relokasi dan santunan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Indikator Persentase luas lahan yang dibebaskan, dengan formulasi luas lahan yang dibebaskan pada tahun n dibagi luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pada tahun n dikali 100%. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, didukung 1 kegiatan :

- i. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan sebagai fasilitasi pembebasan tanah. Indikator luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pertaahun pada tahun n (m^2). Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan :
 - a. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu), aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang membutuhkan tanah dengan pelaksanaan perencanaan dengan appraisal untuk menentukan harga tanah. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pelaksanaan identifikasi pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Desa Wewangriu Kecamatan Malili, yang sementara proses kelengkapan administrasi yaitu nota dinas persetujuan pengadaan tanah dari Dinas PUPR, sebagai instansi yang memerlukan tanah, rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan

Rencana Tata Ruang Wilayah lokasi pengadaan, fotocopy KTP dan alas hak para pemilik lahan rencana lokasi pengadaan tanah (SKT/PBB/sertifikat) dan peta bidang tanah hasil pengukuran oleh kantor Pertanahan Kab. Luwu Timur.

Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program ini dirancang untuk memanfaatkan tanah kosong atau tidak terpakai di daerah agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Elemen-elemen utama yang dilaksanakan adalah identifikasi, inventarisasi, pendataan dan pengamanan. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan tanah kosong. Indikator, persentase pengamanan tanah kosong aset Pemerintah Daerah, dengan formulasi jumlah bidang yang dilakukan pengamanan dibagi jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi dikali 100%. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target program ini didukung oleh kegiatan,

- i. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong adalah kegiatan untuk menginventarisasi aset pemda untuk diberikan tanda pengenal dengan patok dan papan pengumuman. Indikator, jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan pemberian patok dan papan pengumuman pada tanah aset Pemda yang telah didata
- a. Subkegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan pemberian patok dan papan pengumuman pada tanah aset Pemda yang telah didata. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV.

Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Program ini bertujuan mengatur dan mengelola proses pemberian izin bagi aktivitas pembukaan lahan untuk aset Pemda. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah, indikator persentase izin lokasi, formulasi jumlah izin lokasi dibagi permohonan izin lokasi dikali 100%.

Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target program ini didukung oleh kegiatan,

- i. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah, adalah izin yang diberikan untuk penentuan lokasi tanah aset Pemda yang akan dimanfaatkan. Indikator, jumlah dokumen kegiatan Pengendalian pemanfaatan. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target ini didukung oleh subkegiatan,
 - a. Subkegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan fasilitasi penentuan lokasi dengan penetapan surat keputusan Bupati untuk tanah aset pemda yang akan dimanfaatkan. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%.

✦ Program Penatagunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

Program ini adalah upaya pemerintah untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan lahan secara optimal dan berkelanjutan, sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan penggunaan lahan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penatagunaan tanah. Indikator, persentase luas lahan bersertifikat, dengan formulasi luas lahan bersertifikat dibagi luas wilayah seluruh Kabupaten pada tahun n dikali 100%. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Untuk kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target ini didukung oleh kegiatan,

- i. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota, merujuk pada aktivitas pemanfaatan lahan atau tanah yang seluruh wilayahnya terletak dalam batas administrative Kabupaten. Indikator luas lahan bersertifikat yang difasilitasi. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%.. Pencapaian target ini didukung oleh subkegiatan,
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, aktifitas pada subkegiatan ini adalah fasilitasi persertifikatan aset Pemerintah Daerah, indikator luas lahan bersertifikat

yang difasilitasi. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100.

Berikut tabel capaian kegiatan/subkegiatan untuk pencapaian sasaran II,

Tabel 15

Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Subkegiatan Sasaran II

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN				CAPAIAN TRIWULAN			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100%	100%	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100
	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus terdaftar	5 kasus	6	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100
	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	5 berita acara	6	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas lahan yang dibebaskan	100%	100%	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN				CAPAIAN TRIWULAN			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n	2.331 m2	2.331 m2	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100%	100%	100%
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 SK	1 SK	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100%	100%	100%
3	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengamanan tanah kosong aset Pemda	100%	70%	25	25	25	25	25	25 %	25 %	25 %	100 %	100%	100%	100%
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi	15 Bidang	10	25	25	25	25	25	25 %	25 %	25 %	100 %	100%	100%	100%
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah laporan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang diinventarisasi	5	5	25	25	25	25	25	25 %	50 %	50 %	100 %	100%	200%	200%

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN				CAPAIAN TRIWULAN			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin lokasi	100%	0%	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah izin lokasi yang terdaftar	3 dokumen	2 dokumen	25	25	25	25	25	25	50 %	50 %	100	100	200	200
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	2 dokumen	2 dokumen	25	25	25	25	25	25	50 %	50 %	100	100	200	200
5	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	40,35%	60,81%	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas lahan bersertifikat yang difasilitasi	100%	99%	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Luas Lahan bersertifikat yang difasilitasi	20.000 m2	19.895	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100

Tabel 16
 Capaian Sasaran III

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran III memiliki indikator nilai Lakip DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	77,80	0	0

realisasi ini diperoleh dari hasil penilaian Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. LAKIP merupakan gambaran kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD-P. Sehingga untuk capaian pada sasaran ini belum diperoleh pada triwulan IV.

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

- ✚ Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan yang mendukung:
 - i. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, subkegiatan yang mendukung:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, subkegiatan yang mendukung:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- iii. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- iv. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- v. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- vi. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- vii. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- viii. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ix. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- ❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

 - a. Keterlambatan proses administrasi pengadaan barang dan jasa (e-

catalog);

- b. Keterlambatan proses administrasi keuangan;
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- a. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog);
- b. Mencermati rekening belanja dalam proses realisasi keuangan;
- c. Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- d. Melakukan perseuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai.

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu:

- a. Efisiensi anggaran pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada;
- b. Efisiensi belanja internet kantor yaitu biaya wifi kantor, difasilitasi oleh Dinas Kominfo-SP

❖ Efisiensi Sumber Daya

- a. Terdapat jabatan pelaksana yang masih kosong pada lingkup secretariat dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN;
- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan secara berkala untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN

2. Perbandingan antara Target dan Realisasi dengan Sebelumnya

Adapun target dan realisasi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 17
Target dan Realisasi Triwulan IIV

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN (%)				REALISASI TRIWULAN (%)				CAPAIAN TRIWULAN (%)				KET
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	90,87%	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	100%	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	3	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dokumen	12	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN (%)				REALISASI TRIWULAN (%)				CAPAIAN TRIWULAN (%)				KET
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100	33,09	72,4	96,29	100	33,09	33,09	33,09	33,09	100%	46%	46%	34%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang	21	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18 laporan	18	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan	100%	100%	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah skpd yang disusun tepat waktu	4 laporan	4	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah	739.200.000	200.672.000	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN (%)				REALISASI TRIWULAN (%)				CAPAIAN TRIWULAN (%)				KET
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 laporan	4	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 dokumen	12	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 orang	20	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	4	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	3	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN (%)				REALISASI TRIWULAN (%)				CAPAIAN TRIWULAN (%)				KET
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	2	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	2	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 paket	3	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	12	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	12 laporan	12	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100%	100%	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang	43 unit	43	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN (%)				REALISASI TRIWULAN (%)				CAPAIAN TRIWULAN (%)				KET
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		disediakan															
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar diadministrasikan	4 laporan	4	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	3	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasan pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	84	84	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan	13 unit	13	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN (%)				REALISASI TRIWULAN (%)				CAPAIAN TRIWULAN (%)				KET
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan pajaknya															
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	70 unit	70	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1	25	25	25	25	25	25	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan ini dengan Target Jangka Menengah.

Pada triwulan IV, yang dapat dibandingkan hanya pencapaian antara kegiatan dan subkegiatan, karena sifatnya dilaksanakan secara rutin.

4. Capaian Program Pendukung Sasaran III

Tabel 18

Capaian Program Pendukung Sasaran IV

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	CAPAIAN TRIWULAN
					IV	IV	IV
1	2	3	4	5	6	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	90,87%	25%	25%	100%

Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada subbagian perencanaan dan Kepegawaian. Adapun kegiatan dan subkegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

adalah penyiapan dokumen, melalui tiga tahap penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang saling terkait untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu timur. Indikator kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu jumlah. Tahapan target rencana aksi pada triwulan IV (satu), terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga capaian 100%. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 4 subkegiatan antara lain :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah proses penyusunan dokumen rencana kerja yang menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan. Dokumen perencanaan ini dibuat untuk jangka waktu tertentu dan menjadi dasar penganggaran, pelaksanaan, serta

evaluasi kinerja perangkat daerah. Untuk triwulan IV ditargetkan untuk penyusunan Rencana Kerja APBD 2025, dengan rencana aksi pengumpulan data dan informasi kegiatan, melalui tahapan musrembang, identifikasi dan verifikasi usulan kegiatan prioritas, untuk menyusun kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang kemudian akan dituangkan pada dokumen renja APBD 2025.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah proses penyusunan rincian anggaran setelah program dan kegiatan diidentifikasi. Untuk subkegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV, pada triwulan IV terlaksana rencana aksi, rincian kebutuhan anggaran berdasarkan jenis belanja, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal, yang disusun secara rinci dan realitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD adalah tahapan lanjutan dari penyusunan RKA-SKPD yang berfokus pada pengesahan dan pelaksanaan anggaran yang telah disetujui. Untuk subkegiatan rencana aksi dan target tahunan ditetapkan pada triwulan III dan IV. Pada triwulan IV telah menjadi bagian dari rencana aksi subkegiatan sebelumnya yaitu pelaksanaan koordinasi internal (antarbidang) dan eksternal (TAPD).
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah proses untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari dampak kinerja perangkat daerah. Rencana aksi pada subkegiatan ini, meliputi pengumpulan data, analisis dan penilaian berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** adalah penataan keuangan, pencatatan, pengeluaran dan pemasukan melalui tiga tahap penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang saling terkait untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu timur. Indikator kegiatan adalah tersedianya gaji dan tunjangan, laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun tepat waktu . Tahapan target rencana aksi pada triwulan IV, terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga capaian 100%. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 2 subkegiatan antara lain :

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah rincian kebutuhan anggaran berdasarkan jenis belanja, antara lain belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, belanja kertas dan cover dan belanja cetak.
3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah adalah proses pengumpulan data penghuni yang ada pada rusunawa sumasang, rusunawa ASN dan memastikan bahwa data yang terkumpul akurat dan lengkap. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah melakukan pendataan ulang penghuni rusunawa sumasang dan rusunawa ASN. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 1 subkegiatan antara lain :
 - a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah adalah proses perhitungan jumlah retribusi. Rencana aksi pada triwulan III (tiga) yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, belanja alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak dan belanja bahan computer
 4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** adalah proses dan tugas yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan administrasi pegawai dilingkup DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Indikator kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan administrasi yang dibutuhkan pegawai serta menganalisis jabatan dan beban kerja pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 2 subkegiatan antara lain :
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah proses mengumpulkan informasi pegawai dan memastikan bahwa data yang terkumpul akurat dan lengkap. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah pengolahan administrasi pegawai antara lain administrasi gaji dan tunjangan berupa pembuatan Kenaikan gaji berkala, pengelolaan cuti dan presensi serta sosialisasi dan pendampingan pengisian aplikasi E-Kinerja

untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah salah peningkatan kapasitas SDM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tugas dan fungsi. Rencana aksi yang dilakukan pada triwulan IV adalah pengusulan ASN untuk mengikuti beberapa diklat/bimbingan teknis yang berkaitan dengan tuisi secara teknis.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah proses pencatatan, pembukuan, surat menyurat, kearsipan, dan lain sebagainya. Indikator kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan administrasi komponen instalasi Listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan ruah tangga, kebutuhan logistic, kebutuhan barang cetak dan penggandaan, bajah bacaan, fasilitasi kunjungan tamu. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 8 subkegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah kegiatan yang menyediakan peralatan dan alat-alat yang mendukung penerangan bangunan. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja peralatan listrik
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah proses pencatatan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran pekerjaan dan kelancaran administrasi. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah kegiatan untuk menyediakan peralatan yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja modal alat rumah tangga lainnya atau belanja tangga aluminium
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah proses pencatatan kebutuhan bahan logistic. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja BBM dan belanja bahan-bahan lainnya.
- d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah menyediakan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja bahan cetak

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan adalah besaran anggaran yang dibayarkan kepada PNS berupa gaji pokok dan tunjangan yang menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ini dibuat untuk memastikan bahwa pegawai mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku dan menjadi dasar penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Untuk triwulan IV ditargetkan untuk penyusunan Rencana Kerja APBD 2025 dan APBD-P 2024, dengan rencana aksi pengumpulan data penambahan pegawai untuk menyusun kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang kemudian akan dituangkan pada dokumen renja APBD 2025 dan APBD-P 2024.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD adalah proses penyusunan laporan keuangan SKPD berupa laporan realisasi keuangan, neraca, dan catatan atas laporan keuangan SKPD. Untuk subkegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV, yang terlaksana rencana aksi, rincian kebutuhan anggaran berdasarkan jenis belanja, antara lain belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, belanja alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak, belanja bahan komputer, belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas, yang disusun secara rinci dan realitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, untuk APBD 2025 dan APBD-P 2024.
- 2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum barang dilingkup DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Indikator kegiatan adalah persentase barang milik daerah yang ditatausahakan. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 1 subkegiatan antara lain :

- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan wawasan mengenai berita yang sedang beredar .Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah kegiatan yang menyediakan kebutuhan makan dan minum untuk tamu. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja makanan dan snack tamu.
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah kegiatan yang meliputi penyelenggaraan rapat koordinasi dan perjalanan dinas. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi rapat koordinasi dan perjalanan dinas, memastikan kegiatan administrasi perkantoran dapat berjalan efektif dan efisien, meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membantu koordinasi dengan instansi terkait. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah mengetahui jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah.
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** adalah penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya jasa pelayanan umum kantor agar dapat meningkatkan kinerja petugas pelayanan kantor dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Indikator kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah laporan penyediaan jasa surat menyurat, laporan penyediaan jasa komunikasi,SDA dan Listrik, laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 3 subkegiatan antara lain :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah pencatatan administrasi surat masuk dan surat keluar. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah mengetahui jumlah surat masuk dan surat keluar dan belanja ATK yang dibutuhkan.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik adalah proses pendataan kebutuhan air dan Listrik. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja air dan Listrik.

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran pada APBD DPKPP Kabupaten Luwu Timur sebesar RP. 30.139.801.700,- (Tiga Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Seribu Tujuh Ratus Rupiah). Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19
Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/S UBKEGIATAN	KEUANGAN					
		PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
		APBD 2024	APBD-P 2024	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	4.604.112.950	4.687.535.874	4.361.474.318 ,00	93,04	326.061.556	6,96
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	148.932.700	179.412.700	170.252.190,0 0	94,89	9.160.510	5,11
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	54.973.500	54.973.500	53.548.620,00	97,41	1.424.880	2,59
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	5.000.000	5.000.000	4.032.920,00	80,66	967.080	19,34
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (dokumen)	5.000.000	5.000.000	4.324.020,00	86,48	675.980	13,52
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	83.959.200	114.439.200	108.346.630,0 0	94,68	6.092.570	5,32
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.056.629.050	2.766.301.974	2.614.545.363 ,00	94,51	151.756.611	5,49
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	2.982.195.300	2.685.868.224	2.546.954.863 ,00	94,83	138.913.361	5,17
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD (laporan)	74.433.750	80.433.750	67.590.500,00	84,03	12.843.250	15,97
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	19.065.000	19.065.000	19.065.000,00	100,00	-	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	19.065.000	19.065.000	19.065.000,00	100,00	-	-
	Kegiatan Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	6.119.600	7.799.600	7.799.600,00	100,00	-	-
	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah (dokumen)	6.119.600	7.799.600	7.799.600,00	100,00	-	-

- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah proses pendataan tenaga upahjasa pada DPKK. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga keamanan, belanja jasa tenaga supir.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah adalah kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi fisik bangunan, peralatan, dan mesin yang mendukung urusan pemerintah daerah. Indikator kegiatan adalah persentase BMD yang layak fungsi. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 3 subkegiatan antara lain :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah proses pendataan kendaraan dinas yang layak fungsi. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah jumlah kendaraan yang dipelihara.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah mencakup pemeliharaan layanan terjadwal secara berkala, pemeriksaan rutin, dan perbaikan terjadwal maupun darurat. Perawatan ini juga mencakup penggantian atau penyelarasan ulang komponen yang aus, rusak, atau tidak selaras. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja pemeliharaan print, laptop, AC, mesin babat.
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah untuk menjaga kelayakan fungsi bangunan gedung dan prasarannya. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah pemeliharaan Gedung kantor

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/S UBKEGIATAN	KEUANGAN					
		PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
		APBD 2024	APBD-P 2024	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	141.258.200	229.838.200	114.588.030,00	49,86	115.250.170	50,14
	Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	24.728.200	24.728.200	23.059.430,00	93,25	1.668.770	6,75
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	116.530.000	205.110.000	91.528.600,00	44,62	113.581.400	55,38
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	460.907.300	731.867.300	700.344.233,00	95,69	31.523.067	4,31
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor (paket)	4.634.000	4.634.000	4.634.000,00	100,00	-	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (paket)	50.000.000	77.500.000	73.500.000,00	94,84	4.000.000	5,16
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (paket)	7.000.000	60.500.000	44.800.000,00	74,05	15.700.000	25,95
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (paket)	12.628.500	12.628.500	12.621.000,00	99,94	7.500	0,06
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (paket)	18.720.000	18.720.000	11.867.200,00	63,39	6.852.800	36,61
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (dokumen)	13.920.000	13.920.000	13.855.000,00	99,53	65.000	0,47
	Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	21.150.000	15.880.000	15.855.000,00	99,84	25.000	0,16
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	332.854.800	528.084.800	523.212.033,00	99,08	4.872.767	0,92
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.050.000	202.100.000	202.100.000,00	100,00	-	-
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (unit)	230.050.000	202.100.000	202.100.000,00	100,00	-	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.161.100	200.161.100	191.859.302,00	95,85	8.301.798	4,15
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12.696.100	12.696.100	12.631.100,00	99,49	65.000	0,51
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (laporan)	84.865.000	84.865.000	76.628.202,00	90,29	8.236.798	9,71
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	102.600.000	102.600.000	102.600.000,00	100,00	-	-

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/S UBKEGIATAN	KEUANGAN					
		PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
		APBD 2024	APBD-P 2024	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	340.990.000	350.990.000	340.920.600,00	97,13	10.069.400	2,87
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (unit)	97.800.000	97.800.000	96.017.310,00	98,18	0,00	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya (unit)	43.190.000	43.190.000	42.645.000,00	98,74	545.000	1,26
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (unit)	200.000.000	210.000.000	202.258.290,00	96,31	7.741.710	3,69
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.820.090.500	650.830.500	309.439.000,00	47,55	341.391.500	52,45
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	65.094.500	100.114.500	40.391.500,00	40,35	59.723.000	59,65
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	43.974.000	43.974.000	18.536.500,00	42,15	25.437.500	57,85
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	21.120.500	56.140.500	21.855.000,00	38,93	34.285.500	61,07
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.100.000.000	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (unit)	200.000.000	-	-	-	-	-
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana (unit)	400.000.000	-	-	-	-	-
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (unit)	500.000.000	-	-	-	-	-
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	585.740.000	465.740.000	219.401.500,00	47,11	246.338.500	52,89
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (dokumen)	585.740.000	465.740.000	219.401.500,00	47,11	246.338.500	52,89
	Penerbitan Izin dan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	69.256.000	84.976.000	49.646.000,00	58,42	35.330.000	41,58

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/S UBKEGIATAN	KEUANGAN					
		PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
		APBD 2024	APBD-P 2024	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (laporan)	69.256.000	84.976.000	49.646.000,00	58,42	35.330.000	41,58
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.162.149.350	4.912.828.690	4.049.811.104,00	82,43	863.017.586	17,57
	Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	108.583.500	246.343.500	174.202.066,00	70,72	72.141.434	29,28
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (laporan)	108.583.500	246.343.500	174.202.066,00	70,72	72.141.434	29,28
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	17.965.000	321.815.000	5.109.500,00	1,59	316.705.500	98,41
	Penyusunan/Review/Legal isasi Kebijakan Bidang PKP (laporan)	17.965.000	321.815.000	5.109.500,00	1,59	316.705.500	98,41
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (%)	3.035.600.850	4.344.670.190	3.870.499.538,00	89,09	474.170.652	10,91
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	61.850.850	75.320.850	62.688.000,00	83,23	12.632.850	16,77
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	2.973.750.000	4.269.349.340	3.807.811.538,00	89,19	461.537.802	10,81
	PEOGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	12.724.375.000	18.666.068.736	16.548.643.324,48	88,66	2.117.425.412	11,34
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	12.724.375.000	18.666.068.736	16.548.643.324,48	88,66	2.117.425.412	11,34
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	12.724.375.000	18.666.068.736	16.548.643.324,48	88,66	2.117.425.412	11,34
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	5.162.500	4.086.500	1.923.120,00	47,06	2.163.380	52,94
	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	5.162.500	4.086.500	1.923.120,00	47,06	2.163.380	52,94
	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.162.500	4.086.500	1.923.120,00	47,06	2.163.380	52,94

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/S UBKEGIATAN	KEUANGAN					
		PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
		APBD 2024	APBD-P 2024	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERURIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	510.826.000	975.676.000	947.270.112,0 0	97,09	28.405.888	2,91
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	510.826.000	975.676.000	947.270.112,0 0	97,09	28.405.888	2,91
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	510.826.000	975.676.000	947.270.112,0 0	97,09	28.405.888	2,91
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	90.225.400	84.680.400	83.294.320,00	98,36	1.386.080	1,64
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	90.225.400	84.680.400	83.294.320,00	98,36	1.386.080	1,64
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	90.225.400	84.680.400	83.294.320,00	98,36	1.386.080	1,64
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	5.080.000	3.415.000	713.750,00	20,90	2.701.250	79,10
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	5.080.000	3.415.000	713.750,00	20,90	2.701.250	79,10
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	5.080.000	3.415.000	713.750,00	20,90	2.701.250	79,10
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	163.780.000	154.680.000	140.805.665,0 0	91,03	13.874.335	8,97
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	163.780.000	154.680.000	140.805.665,0 0	91,03	13.874.335	8,97
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	163.780.000	154.680.000	140.805.665,0 0	91,03	13.874.335	8,97
		23.085.801.70 0	30.139.801.70 0	26.443.374.71 3,48	87,74	3.696.426.987	12,26

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur tahun 2021–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur triwulan IV Tahun 2024.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

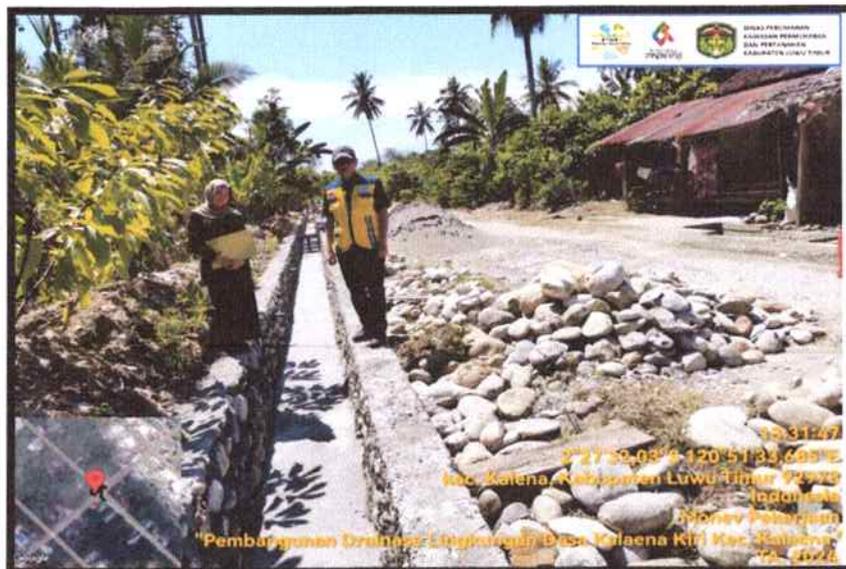
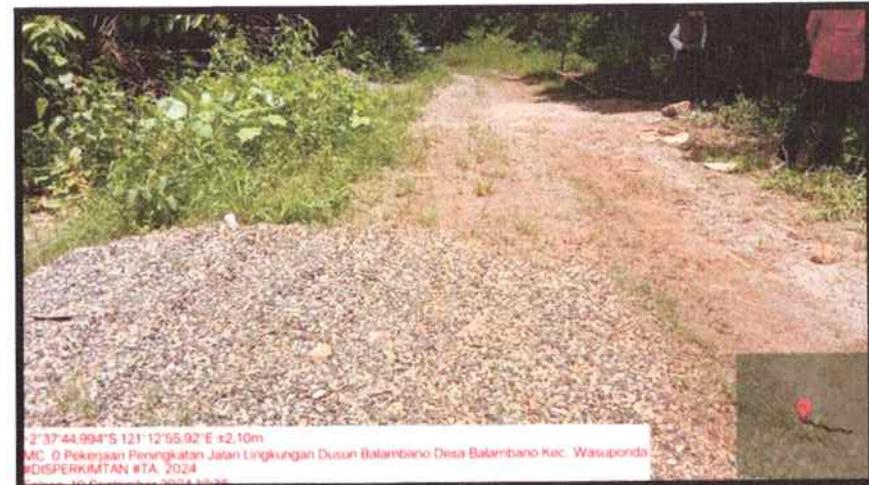
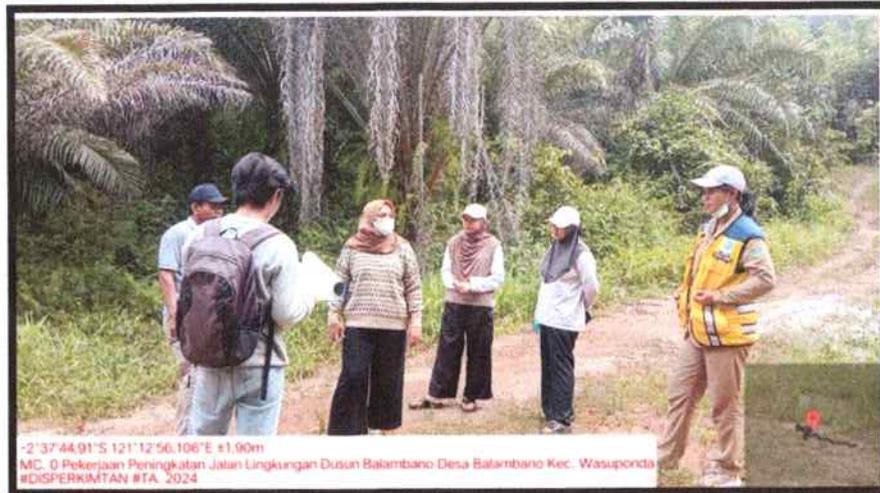
Demikian Laporan Evaluasi Triwulan IV Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

Malili, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS,


ANDI WIJA HASAN, ST
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740323 200312 1 004

Lampiran
 Dokumentasi Pendukung Sasaran I

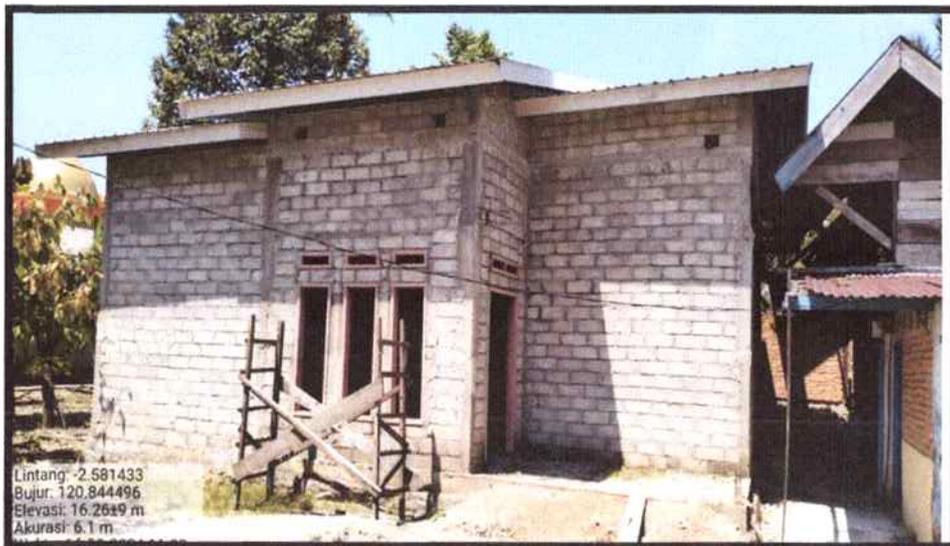


Dokumentasi Sasaran II

Pemasangan patok pengaman tanah aset Pemda



Bedah rumah





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
PARA KEPALA SUBBAGIAN PADA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

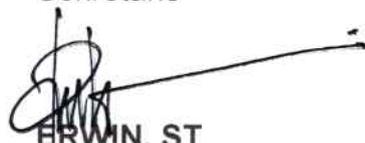
Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 02 Januari 2025
Yang Melakukan Evaluasi
Sekretaris


ERWIN, ST
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP: 197212052003121002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili, Kodepos 92981
Telepon : (0474) 321-634, Fax. : (0474) 321-634

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN IV

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, dengan melihat realisasi keuangan dan kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), rekomendasi pada triwulan III telah ditindaklanjuti pada triwulan IV, selanjutnya untuk triwulan IV, terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan IV, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kasubag Umum dan Keuangan
 - a. Melakukan penginputan pada aplikasi PPID untuk keterbukaan informasi pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur;
 - b. Percepatan untuk konsolidasi realisasi keuangan;
 - c. Memperhatikan kebersihan area kantor.
2. Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian
 - a. Menyusun dokumen-dokumen terkait SAKIP sebagai bahan evaluasi.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan ASN dan upah jasa.

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Sekretariat DPKPP.

Malili, 02 Januari 2025

Sekretaris,

ERWIN, ST

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 197212052003121002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981

Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
KEPALA BIDANG PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Para Kepala Bidang pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 02 Januari 2025
Yang Melakukan Evaluasi
Kepala Dinas

ANDI WIJA HASAN, ST
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 197403232003121004



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili, Kodepos 92981
Telepon : (0474) 321-634, Fax. : (0474) 321-634

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN IV

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, dengan melihat realisasi keuangan dan kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan pada bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), rekomendasi pada triwulan III telah ditindaklanjuti pada triwulan IV, selanjutnya untuk triwulan IV, terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan IV, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris
 - a. Melakukan monitoring terhadap penyusunan laporan keuangan dan Kinerja APBD-P 2024;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kehadiran ASN dan Upah jasa selama setahun;
 - c. Melakukan evaluasi tugas Tim Reformasi Birokrasi terkait rencana aksi triwulan IV dengan tema pengentasan kemiskinan;
2. Kepala Bidang Perumahan
 - a. Melakukan percepatan terkait administrasi kepemilikan pada Rusunawa Sumasang dan PNS periode tahun 2025;
 - b. Menindaklanjuti serah terima hibah PSU Perumahan dari APBN.
3. Kepala Bidang Sarana Prasaran dan Kawasan Permukiman
 - a. Koordinasi dengan BUD dan Bidang Percepatan terkait pelaksanaan proses pembayaran pihak ketiga, yang SPMnya telah diterbitkan, tapi masih terkendala penerbitan SP2D, kegiatan fisik sehingga dapat selesai tepat;
 - b. Berkoordinasi dengan para Camat dan Lurah terkait, untuk pelaksanaan bantuan bedah rumah kelurahan, sehingga dapat berjalan lancar;
4. Kepala Bidang Pertanahan
 - a. Melakukan koordinasi aktif dengan BPN Kab. Luwu Timur, terkait permintaan data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian laporan akhir tahun.
 - b. Melakukan koordinasi terkait percepatan penerbitan sertifikasi tanah aset Pemda.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili, Kodepos 92981
Telepon : (0474) 321-634, Fax. : (0474) 321-634

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang-bidang pada DPKPP.

Malili, 02 Januari 2025
Kepala DPKPP



ANDI WIJA HASAN, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197403232003121004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No.Telp. (0474) 321004 Website: <http://dpkpp.luwutimurkab.go.id>

Malili, 06 Januari 2025

Nomor : 100-22-21/da/DPKPP
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi

Yth : **Para ASN dan Upah Jasa DPKPP Kabupaten Luwu Timur**
di
Tempat

Bahwa dalam rangka evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, akan diselenggarakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja dengan agenda rapat sebagai berikut :

1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;
2. Laporan realisasi anggaran;
3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi berjenjang Sekretariat dan Bidang
4. Laporan Implementasi BerAKHLAK

Untuk maksud tersebut di atas, maka dengan ini saudara diundang untuk menghadiri rapat tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Januari 2025

Pukul : 08.00 Wita-Selesai

Tempat : Ruang Rapat DPKPP Kab. Luwu Timur

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,


ANDI WIJA HASAN, ST
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda
NIP. 19740323 200312 1 004

Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu Timur;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur

NOTULEN RAPAT

- I. Agenda Rapat : Rapat Monitoring dan Evaluasi
- II. Hari/Tanggal : Selasa / 07 Januari 2025
- III. Tempat : Ruang Rapat Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kab. Luwu Timur
- IV. Waktu Rapat : 08.00 Wita
- V. Pimpinan Rapat : Kepala Dinas PKPP
- VI. Peserta Rapat : Daftar hadir terlampir
- VII. Kegiatan Rapat :

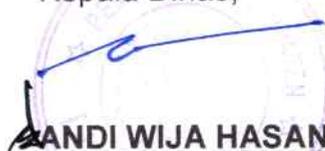
Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas, pada rapat koordinasi tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Evaluasi terkait daya serap anggaran, program kegiatan yang belum selesai dan/atau kegiatan yang tidak terlaksana sampai akhir APBD 2024;
2. Penjelasan dari masing-masing Kepala bidang terkait gambaran singkat kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab program dan kegiatan serta rencana aksi pada tahun 2025;
3. Laporan Kepala Bidang Sarana Prasarana untuk pelaksanaan kegiatan, telah selesai sementara untuk proses pembayaran masih SPM belum terbit SP2D, masih menunggu informasi dari bidang akuntansi terkait realisasinya;
4. Laporan Kepala Bidang Perumahan, bahwa untuk penerimaan pendapatan sampai bulan Desember 2024, realisasi yang diterima belum sesuai dengan rencana yang ditargetkan, sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih aktif untuk penyelesaian masalah tersebut;
5. Laporan Kepala Bidang Pertanahan, bahwa untuk pengadaan tanah RTH yang berada di Desa Wewangriu, yang merupakan usulan dari Dinas PUPR, telah dilaksanakan proses pembayaran, pada APBD 2025 telah dianggarkan untuk kurang bayar pemilik tanah. Program pelayanan pertanahan secara keseluruhan hamper 100% pelaksanaan kinerja, sedangkan untuk keuangan menyesuaikan dengan kebutuhan. Mengingat ada beberapa program anggarannya disiapkan.
6. Laporan realisasi anggaran yang disampaikan oleh Kasubag. Keuangan, menyampaikan bahwa realisasi keuangan pada tahun 2024 adalah 87,74%, dengan anggaran Rp.30.139.801.700, dan realisasi Rp. 26.443.374.713,48. Terkait realisasi belum dilakukan konsolidasi dengan bidang anggaran, karena ada beberapa SPM yang telah dimasukkan tetapi masih terkendala penerbitan SP2D, sehingga realisasi ini masih belum valid.
7. Laporan kinerja yang dipaparkan oleh Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian, perlu penyajian data dan narasi dari masing-masing bidang, untuk pemenuhan informasi untuk penyusunan dokumen evaluasi rencana kerja dan evaluasi berjenjang sesuai rekomendasi LHE dari Inspektorat, percepatan respon terhadap permintaan data-data pendukung penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, SPM, SDGs dan RKPD Tahun 2024. Untuk pelayanan kepegawaian percepatan pengisian pada aplikasi E-Kinerja dan aplikasi-aplikasi yang mendukung kepegawaian.

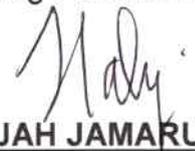
8. Laporan Sekretaris, terkait kehadiran dan kedisiplinan para PNS dan tenaga upah jasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, untuk menjadi perhatian dan perlu ditingkatkan, kebersihan pada area kantor dan kolaborasi antar bidang untuk penyelesaian tugas fungsi kedinasan.
9. Monitoring dan evaluasi tugas Tim Reformasi Birokrasi terkait rencana aksi pada triwulan IV tahun 2024, tindak lanjut rencana aksi serta pelaksanaan budaya BerAKHLAK lingkup DPKPP;
10. Agar untuk informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk dipublikasikan;
11. Percepatan dalam penyusunan kebijakan terkait urusan Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan pada APBD 2025, seperti SK Kepla Dinas PPK, PPTK dsbnya, sehingga kegiatan-kegiatan dapat segera terealisasi.
12. Memperhatikan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian pengaduan masyarakat urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
13. Penyampaian terkait penolakan jika ada pemberian berupa gratifikasi untuk mencegah terjadinya praktek KKN dilingkup DPKPP.

Demikian Notulen Rapat ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut pada triwulan selanjutnya.

Mengetahui
PIMPINAN RAPAT
Kepala Dinas,


ANDI WIJA HASAN, ST
NIP. 197403232003121004

NOTULIS,
Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian,


HALIJAH JAMARUDDIN, S.Si
NIP. 198604152011012022

Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi

Hari/Tanggal : Selasa / 07 Januari 2025

Tempat : Ruang Rapat Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kab. Luwu Timur

Waktu Rapat : 08.00 Wita





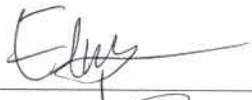
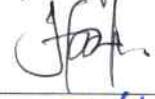
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

JL. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, No. Telp/Fax (0474) 321 634
Kode Pos 92981

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

HARI : SELASA, 07 Januari 2025
TANGGAL : 07 Januari 2025
JAM : 08.00 - Selesai
TEMPAT : Ruang Rapat DPKPP
ACARA : Rapat Monitoring dan Evaluasi

NO	NAMA	JK	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	A. Wija Han	L	Kabid	
2.	ERWIN	L	sekretaris	
3.	DARMAWATI	P	Kasubag Urut	
4.	Hajjah Jamaruddin	P	Kasubag. Perencanaan & kerp	
5.	IWAN SERIKWAN	L	KABID	
6.	INDRA	L	Kabid pertanahan	
7.	EMILIA LANDE	P	FUNGSIONAL PKP	
8.	ICHSAN	L	FUNGSIONAL PKP	
9.	Zahay	L	Staf	
10.	Muhdi an.	L	Staf	
11.	NAUWI WUIANDARI	P	fungsianal Analis kebijakan	
12.	REYNAL P.	L	Fungsional Analis kebijakan	

NO	NAMA	JK	JABATAN	TANDA TANGAN
13.	Nining Hamriani	P	Staf Mutu Jasa	
14.	Audi Makkarau	L	Fungsional PkP	
15.	Saniani, ST	P	Staf Sarpras dan PkP	
16.	Elshi Ramdani, SM	P	Staf Bid. Keuangan	
17.	Andi Inanti Jaya	P	Staf Bid. Pertanahan	
18.	LINDA	P	Staf BIDAN PERUMAHAN	
19.	Rusdi	L	Staf	
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				